

**PENERAPAN ASSESMENT TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA
DAN PSIKOTROPIKA DALAM PERKARA PIDANA (STUDI KASUS
PADA PENGADILAN NEGERI SEMARANG PERKARA NOMOR:
225/PID.SUS/2013/PN. SMG)**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Magister (Strata Dua)

Program Magister Ilmu Hukum



Oleh :

**ERIS EFFENDI, SH
2013-02-006**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MURIA KUDUS
KUDUS
2015**

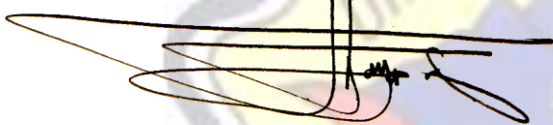
**PENERAPAN ASSESMENT TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA
DAN PSIKOTROPIKA DALAM PERKARA PIDANA (STUDI KASUS
PADA PENGADILAN NEGERI SEMARANG PERKARA NOMOR:
225/PID.SUS/2013/PN. SMG)**

Disusun Oleh :

ERIS EFFENDI, SH
2012-02-006

Telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal

Pembimbing Utama



Dr.Hidayatullah,SH.,MHum

Anggota Dewan Penguji I



Dr.Sukresno, SH,M.Hum

Pembimbing Pendamping



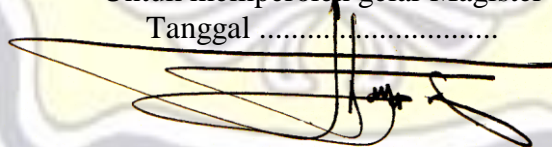
Iskandar Wibawa,SH.,MH

Anggota Dewan Penguji II



Suciningtyas, SH, MHum

Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan
Untuk memperoleh gelar Magister
Tanggal



Dr.Hidayatullah, SH, M.Hum
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ERIS EFFENDI, SH.

NIM : 2013-02-006

Alamat : RT.08/01 DSN NGETUK NGEMBALREJO KEC.BAE
KAB.KUDUS

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena tesis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Kudus,
Yang membuat pernyataan

ERIS EFFENDI, SH.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucap Alhamdulillah robbil 'alamiin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan dan curahan rahmat, ridho dan bimbingan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **PENERAPAN ASSESMENT TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DALAM PERKARA PIDANA (STUDI KASUS PADA PENGADILAN NEGERI SEMARANG PERKARA NOMOR : 225/PID.SUS/2013/PN.SMG)**

Tesis ini disusun dengan maksud untuk memenuhi sebagai persyaratan mencapai derajat Magister Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih sangat jauh dari sempurna, karena itulah kritik dan saran selalu Penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini untuk kedepannya.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih secara tulus dan mendalam atas semua dukungan dan bantuan yang telah diberikan dalam penyusunan tesis ini, kepada :

1. Bapak Dr.Suparno, SH, MS, selaku Rektor Universitas Muria Kudus;
2. Bapak Dr. Hidayatullah, SH.M.Hum Ketua Program Pasca Sarjana Universitas Muria Kudus sekaligus sebagai dosen pembimbing yang di dalam berbagai kesibukan dapat menyempatkan diri membimbing dan mengarahkan serta memberi petunjuk dan saran yang sangat berharga bagi penulis Tesis ini.
3. Bapak Iskandar Wibawa, S.H, M.Hum selaku pembimbing pendamping yang membimbing hingga penulis Tesis ini tersusun dengan baik.

4. Ketua Pengadilan Negeri Semarang yang telah memberi ijin survey kepada penulis untuk mendapatkan penelitian;
5. Kantor Djarot Widjayanto dan Associates bersama rekan rekan yang senantiasa memberi semangat penuh kasih sayang untuk menyelesaikan Tesis ini.
6. Seluruh staf dan pegawai Program Pascasarjana, yang telah banyak membantu penulis selama kuliah di Program Pascasarjana Universitas Muria Kudus.
7. Istri dan anak-anakku yang telah mendukung dan menyemangati sehingga dapat menggugah penulis untuk menyelesaikan Tesis ini.
8. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam bentuk apapun baik dari pihak keluarga maupun dari pihak lain orang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya

Akhirnya dengan memohon bimbingan dan keridhoan Allah SWT, kiranya hasil karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Kudus,
Penulis,

Eris Effendi, SH

ABSTRAK

Tesis dengan judul “**PENERAPAN ASSESMENT TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DALAM PERKARA PIDANA (STUDI KASUS PADA PENGADILAN NEGERI SEMARANG PERKARA NOMOR: 225/PID.SUS/2013/PN. SMG).**”

Penentuan sanksi terhadap pecandu narkotika, apakah akan diterapkan sanksi pidana atau sanksi tindakan, penentuannya berada di tangan hakim. Sebab berdasarkan ketentuan undang-undang narkotika, memberikan kewenangan bagi hakim untuk menentukan akan menjatuhkan pidana penjara atau tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah paling tepat, karena berdasarkan tinjauan victymologi bahwa pecandu narkotika adalah sebagai *self victimizing victims* yaitu korban sebagai pelaku, victymologi tetap menetapkan penyalahgunaan narkotika sebagai korban, meskipun korban dari tindak pidana/kejahatan yang dilakukannya sendiri. Oleh karena itu, maka pecandu narkotika yang juga sebagai korban patut untuk mendapat perlindungan. Namun, karena pecandu narkotika juga sebagai pelaku suatu tindak pidana/kejahatan maka ia juga harus tetap dihukum, oleh karena hal inilah maka dikatakan bahwa *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah paling tepat.

Selanjutnya Penulis menyampaikan beberapa saran. Bahwa antara penyalahguna, pecandu dan korban penyalahguna narkotika sebagaimana dimaksud pada UU No. 35 Tahun 2009 yang kemudian diperjelas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) No. 4 Tahun 2010, terdapat suatu perbedaan yang jelas dan dapat dibuktikan melalui proses asesment atau pengujian atas pengguna Narkotika yang menunjukkan apakah ada ketergantungan yang tinggi terhadap Narkotika ataukah sebaliknya, maka itu di dalam penanganan kasus kejahatan narkotika, para penegak hukum (Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim) diharapkan untuk mengoptimalkan pembuktian dalam memutus perkara sehingga di mungkinakan para pecandu /korban penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan tindakan dengan melalui tahapan rehabilitasi yang berkaitan kualifikasi penyalahguna, pecandu atau korban penyalahguna Narkotika melalui proses asesment tersebut serta jumlah kadar Narkotika yang dimiliki oleh Pengguna sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) No. 4 Tahun 2010, sehingga nantinya dapat tepat menjatuhkan pidana penjara yang diatur dalam Pasal 127 atau menjatuhkan tindakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kata kunci : *Narkotika, Pecandu.*

ABSTRACT

Thesis title. ASSESSMENT OF APPLICATION OF NARCOTICS AND PSYCHOTROPIC USERS IN CRIMINAL CASE (CASE STUDY ON COURT CASE IN SEMARANG NUMBER: /PID.SUS/2013/PN. SMG).

Determination sanctions against drug addicts, whether to apply penal sanctions or measures, determination is in the hands of judges. Because under the provisions of the narcotics law, giving authority to the judges to decide would impose imprisonment or rehabilitation measures against the drug addicts.

Based on the results of double track system in the formulation of sanctions against the crime of drug abuse is the most appropriate, because it is based on a review victymologi that drug addicts are as self-victimizing victims are victims as perpetrators, victymologi still define drug abuse as a victim, although the victim of a criminal offense / crime they do theirsself. therefore, the drug addict who is also a victim worthy of protection. However, due to drug addicts as well as perpetrators of a crime/crime then they must be punished, because of this reason, it is said that the double track system in the formulation of sanctions against the crime of drug abuse is the most appropriate.

Furthermore Writer convey some suggestion that among abusers, addicts and victims of drug abusers referred to in Law No. 35 of 2009 which was then clarified by the Appellate Court of the Republic of Indonesia (SEMA RI) No. 4 In 2010, there is a clear distinction and can be proven through the process asesment or testing of the Narcotics indicating whether there is a high dependence on narcotics or vice versa, so that in the handling of the case of narcotics, law enforcement (Investigator, Public Prosecutor and Judge) is expected to optimize the evidence in deciding the case so that in the possible addicts / abusers of narcotics can be taken through the stages of rehabilitation-related qualifications abusers, addicts or victims of abusers of narcotics through asesment is and the number of levels of Narcotics owned by the User as defined in Circular of the Supreme Court of the Republic of Indonesia (SEMA RI) No. 4 of 2010, so that later can be precisely dropped imprisonment set forth in Article 127 or drop the rehabilitation measures referred to in Article 103 of Law No. 35 Year 2009 on Narcotics.

Keywords : Narcotics, adicts

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang.....	1
B Perumusan Masalah.....	16
C Tujuan Penelitian.....	21
D Manfaat Penelitian.....	26
E Kerangka Pemikiran	28
F Metode Penelitian	34

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A Tinjauan Umum Tentang Narkotika.....	40
1. Pengertian Narkotika	40
2. Jenis Narkotika	42
3. Tindak Pidana Narkotika	46
4. Sanksi Tindak Pidana Narkotika.....	49
5. Badan Narkotika Nasional	50
B Tinjauan Umum Tentang Narkotika.....	55
1. Pengertian Pemidanaan	55
2. Tujuan Pemidanaan.....	57
3. Teori Pemidanaan	59

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A Kebijakan Sanksi Pidana UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	61
1. Penetapan Double Track System pada UU Narkotika	61
2. Mekanisme Rehabilitasi Bagi Tersangka atau Terdakwa Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Proses Peradilan	65
B Implementasi Double Track System yang diteliti	68
1. Kasus Polisi	68
2. Pertimbangan Hakim	70
3. Putusan Hakim	87
4. Analisa Penulis	88

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	94
B. Saran	96

DAFTAR PUSTAKA	98
----------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

A. Putusan pengadilan PN Semarang	100
B. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan NAPZA	101